

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa Kabupaten Sumba Tengah

Daniel Dangi Loja¹⁾, Kristyan Dwijosusilo²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: danieldangiloja@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu wilayah Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi wisata yang beragam, baik alam maupun budaya adalah Wilayah Sumba Tengah. Wilayah Sumba Tengah menyimpan banyak keindahan alam dan budaya wisata. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebenarnya telah berupaya untuk melakukan pengembangan pariwisata di wilayah Sumba Tengah. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah mengusulkan rencana pembangunan kawasan destinasi pariwisata prioritas (DPP). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pariwisata di Kampung Adat Kambajawa Kabupaten Sumba Tengah; dan untuk mendeskripsikan usaha dan Hasil Pengembangan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa Kabupaten Sumba Tengah; serta untuk mendeskripsikan implementasi Pengembangan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan Teori George Edward III; dan juga untuk Mendeskripsikan Faktor Pendukung dan Penghambat Impelementasi Pengembangan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa di Kabupaten Sumba Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Rancangan penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan model Implementasi Kebijakan George Edward III. Lokasi penelitian dilakukan pada Kampung Adat Kambajawa Kabupaten Sumba Tengah. Informan penelitian adalah Sekretaris Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sumba Tengah, Pengelola wisata, Kepala Desam, Masyarakat / warga, Pelaku usaha, Pelaksana program / kegiatan pengembangan serta Pengunjung. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan didapatkan kesimpulan penelitian bahwa Implementasi Pengembangan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa Kabupaten Sumba Tengah secara garis besar telah memenuhi parameter Implementasi Kebijakan sesuai Teori George Edward III. Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa di Kabupaten Sumba Tengah adalah Adanya Sumber Daya Manusia yang cukup dan Kejelasan Struktur Birokrasi. Sedangkan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa di Kabupaten Sumba Tengah adalah Minimnya Pendanaan Pengembangan Wisata, Kurangnya sikap peduli Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata dan Kendala Sinyal dalam komunikasi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata

Abstract

One of the areas of East Nusa Tenggara that has diverse tourism potential, both natural and cultural, is the Central Sumba Region. The Central Sumba Region holds many natural and cultural tourist attractions. The Central Sumba Regency Government has actually made efforts to develop tourism in the Central Sumba region. The Central Sumba Regency Government has proposed a plan to develop a priority tourism destination area (DPP). The purpose of this study is to describe tourism in the Kambajawa Traditional Village, Central Sumba Regency; and to describe the efforts and results of the Kambajawa Traditional Village Tourism Development, Central Sumba Regency; and to describe the implementation of the Kambajawa Traditional Village Tourism Development, Central Sumba Regency based on George Edward III's Theory; and also to Describe the Supporting and Inhibiting Factors in the Implementation of the Kambajawa Traditional Village Tourism Development in Central Sumba Regency. This type of research is qualitative research. The research design used by the author is descriptive qualitative. The focus of this study uses the George Edward III Policy Implementation model. The location of the research was carried out in the Kambajawa Traditional Village, Central Sumba Regency. The research informants were the Secretary of the Tourism and Culture Office of Central Sumba Regency, Tourism Managers, Village Heads, Community/Residents, Business Actors, Program/Development Activity Implementers and Visitors. The analysis flow follows the interactive analysis

model as expressed by Miles and Huberman. Based on the results of data analysis and discussion, the research conclusion was that the Implementation of Tourism Development in the Kambajawa Traditional Village in Central Sumba Regency has generally met the parameters of Policy Implementation according to George Edward III's Theory. Supporting factors for the Implementation of Tourism Policy in the Kambajawa Traditional Village in Central Sumba Regency are the Availability of Sufficient Human Resources and Clarity of Bureaucratic Structure. While the inhibiting factors for the Implementation of Tourism Policy in the Kambajawa Traditional Village in Central Sumba Regency are the Minimal Funding for Tourism Development, the Lack of caring attitude of the Tourism Office in Tourism Development and Signal Constraints in communication.

Keywords: Policy Implementation, Tourism Development

A. LATAR BELAKANG

Keberagaman budaya di Indonesia dapat menjadi kekuatan utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peluang ini, pemerintah menetapkan sektor pariwisata budaya sebagai salah satu perekonomian dan turut memberikan kesejahteraan masyarakat. Dengan keberagaman budaya yang banyak di Indonesia menjadi peluang dalam pengembangan pariwisata nasional.

Industri pariwisata ialah industri yang berkaitan pada sektor lain karena adanya interaksi wisatawan, pebisnis, pemerintah serta masyarakat wisata. Salah satu keanekaragaman di Indonesia terdapat pada Nusa Tenggara Timur. Salah satu wilayah Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi wisata yang beragam, baik alam maupun budaya adalah Wilayah Sumba Tengah.

Wilayah Sumba Tengah menyimpan banyak keindahan alam dan budaya wisata. Berdasarkan data dari website “EMAS” sebagai pengelolaan Data Sektoral terkait Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik pada wilayah Sumba Tengah menunjukkan bahwa jumlah total wisatawan yang datang ke Sumba Tengah hanya mencapai jumlah 1.270 wisatawan pada tahun 2021. Berikut data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik pada wilayah Sumba Tengah yaitu:

Tabel 1 Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik pada wilayah Sumba Tengah Tahun 2021

No	BULAN	WISATAWAN MANCANEGERA			WISATAWAN DOMESTIK			TOTAL
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
1	JANUARI	15	12	27	60	63	123	150
2	FEBRUARI	25	20	45	30	35	65	110

No	BULAN	WISATAWAN MANCANEGERA			WISATAWAN DOMESTIK			TOTAL
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
3	MARET	20	11	31	20	15	35	66
4	APRIL	15	20	35	11	25	36	71
5	MEI	20	11	31	28	12	40	71
6	JUNI	27	15	42	23	21	44	86
7	JULI	50	33	83	60	34	94	177
8	AGUSTUS	55	32	87	80	70	150	237
9	SEPTEMBER	11	0	11	50	20	70	81
10	OKTOBER	7	7	14	75	15	90	104
11	NOVEMBER	15	5	20	40	35	75	95
12	DESEMBER	3	1	4	11	7	18	22
Total		263	167	430	488	352	840	1270

Sumber: Website EMAS (2024)

Jumlah wisatawan pada wilayah Sumba Tengah tersebut hanya menyumbang sebesar 8% wisatawan dari keseluruhan wisatawan yang datang pada wilayah Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan sebanyak 15.644 wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pariwisata Sumba Tengah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah Nusa Tenggara Timur yang lain. Berdasarkan data dari Ikatan Keluarga Sumba Tengah (2023) menyatakan pariwisata Sumba Tengah masih tertinggal pada berbagai aspek. Maka penting dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan pariwisata di wilayah Sumba Tengah. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebenarnya telah berupaya untuk melakukan pengembangan pariwisata di wilayah Sumba Tengah. Berikut gambaran pariwisata di Kampung Adat Kambajawa yaitu:



Gambar 1 Kampung Adat Kambajawa

Sumber: Google Maps (2024)

Berdasarkan data internal pengelola Kampung Adat Kambajawa dapat diketahui terjadi peningkatan jumlah wisatawan pada tahun 2023 sebanyak 740 wisatawan dibandingkan tahun 2022. Berikut data wisatawan yang berkunjung pada Kampung Adat Kambajawa tahun 2022 dan 2023 yaitu:

Tabel 2 Jumlah Wisatawan di Kampung Adat tahun 2022 hingga 2023

Wisatawan	Jumlah Wisatawan	
	2022	2023
Mancanegara	859	2.181
Domestik	3.049	2.513
Total	4.040	4.790

Sumber: Viana (2024)

Dari data diatas menunjukkan Kampung Adat Kambajawa menjadi destinasi wisata bagi masyarakat. Namun dengan banyaknya wisatawan yang datang Kampung Adat Kambajawa tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas penunjang pariwisata yang mendukung. Berdasarkan hasil observasi pada Kampung adat Kambajawa dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan pariwisata seperti akses jalan yang belum diaspal, tidak adanya pos jaga dan tempat parkir, kurangnya toilet umum serta tidak adanya papan nama situs/kampung. Dengan kurangnya fasilitas penunjang pariwisata pada Kampung Adat Kambajawa dapat menghambat daya tarik pariwisata.

Berdasarkan permasalahan dapat diketahui untuk mendukung pariwisata di Kampung Kambajawa, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah telah

mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam peraturan ini berisikan mengenai hak dan kewajiban dari wisatawan serta pengelola wisata. Selain itu juga diatur mengenai pengembangan pariwisata melalui pembangunan infrastruktur dan pembinaan masyarakat wisata. Namun pada kenyataannya implementasi ini masih belum optimal. Maka peneliti akan melakukan kajian mengenai “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa Kabupaten Sumba Tengah”

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mendeskripsikan pariwisata di Kampung Adat Kambajawa; (2) Untuk mendeskripsikan usaha dan Hasil Pengembangan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa; (3) Untuk mendeskripsikan implementasi dalam Pengembangan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa berdasarkan Teori George Edward III; dan (4) Untuk Mendeskripsikan Faktor Pendukung serta Penghambat Impelementasi Pengembangan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa.

B. LANDASAN TEORITIS

1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan ialah cetak biru bagi tindakan untuk mempengaruhi perilaku orang banyak. Kebijakan disusun untuk mengarahkan perilaku pada tujuan yang diinginkan (Nasution et al., 2023)

2 Pengertian Publik

Menurut Alfitriadi, (2022), publik ialah kumpulan banyak orang yang sesuai stimuli sama yakni dari kedekatan antar anggota. Menurut Asmara et al., (2022) public ialah kumpulan yang tertarik pada isu dan berupaya mengatasinya.

3 Pengertian Publik

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2018:8) yang mengatakan “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak”. Kebijakan publik ialah hal yang dipilih pemerintah untuk dilakukan

atau tidak. Kebijakan publik mengabdikan pada kepentingan masyarakat (Rahayu & Gufron, 2020).

4 **Pengertian Implementasi**

Implementasi dapat dihubungkan pada kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Implementasi menurut Mulyadi, (2019:45) ialah proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Meter dan Horn dalam Ratri (2019:4), menyatakan implementasi kebijakan publik selaku tindakan individu atau kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan

5 **Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Eminue dalam Kristian, (2023), implementasi kebijakan publik ialah proses perubahan masukan manusia dan material menjadi keluaran berupa barang dan jasa. Dalam implementasi kebijakan public berupaya mengubah mandat menjadi kenyataan. Implementasi kebijakan tidak dimulai sebelum tujuan-tujuan ditetapkan oleh keputusan kebijakan.

6 **Pengertian Pengembangan**

Pengembangan adalah strategi yang dilakukan guna untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memajukan daya tarik wisata agar jumlah wisatawan mengalami eskalasi sehingga terdapat dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah (Paturusi, 2001).

7 **Pengertian Pariwisata**

Pariwisata ialah perjalanan seseorang untuk sementara untuk menikmati kegiatan pertamasyaan sesuai keinginan (McIntosh, 2019). Industri pariwisata ialah industri dengan keterkaitan yang kuat pada sektor lain, karena pariwisata menjadi gabungan fenomena dan hubungan timbal balik dari interaksi dengan wisatawan, pebisnis, pemerintah tujuan wisata serta masyarakat (Yoeti, 2020).

8 **Pengertian Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan pariwisata didefinisikan sebagai upaya yang berupa rangkaian terpadu untuk mewujudkan penggunaan sumber daya industri pariwisata dan mewujudkannya di segala aspek usaha baik secara langsung atau tidak dalam pengembangan pariwisata (Swarbrooke, 2020). Menurut Darmatiasia et al., (2020), Pengembangan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misi. Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari arah pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia.

9 **Pariwisata atau Wisata Rumah Adat**

Wisata rumah adat adalah destinasi wisata yang menampilkan rumah adat sebagai salah satu bentuk representasi kebudayaan suatu daerah. Rumah adat merupakan bangunan tradisional yang memiliki ciri khas dan digunakan sebagai tempat tinggal oleh suatu suku bangsa (Nuraimma, 2018). Tujuan wisata rumah adat adalah untuk melestarikan dan memperkenalkan rumah adat sebagai salah satu warisan budaya yang memiliki nilai tinggi sehingga dapat Melestarikan dan Mengenalkan Rumah adat.

C. **METODE**

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif . Rancangan penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan riset dan menekan subjektifitas juga arti pengalaman bagi individu. Penelitian deskriptif kualitatif ialah metode penelitian untuk mendeskripsikan, menjelaskan, serta menjawab secara rinci akan masalah (Sugiyono, 2020).

2. **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini menggunakan

model Implementasi Kebijakan George Edward III. George C Edwards III mengimplementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: (1) Komunikasi (*Communication*). Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. (2) Sumber Daya (*Resources*). Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan dan aturan, jika para pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif / Sumber daya ini mencakup : (a) Sumber Daya Manusia; Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitasnya. (b) Anggaran (*Budgetary*); Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program untuk menjamin terlaksananya kebijakan. (c) Fasilitas (*facility*); Faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, pengadaan fasilitas yang layak/; (d) Informasi dan Kewenangan (*information and Authority*); Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. (3) Disposisi (*Disposition*). Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai tujuan atau sasaran. (4) Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*). Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu

mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek tersebut adalah mekanisme dalam *Standart Operation Procedure* (SOP) dan struktur birokrasi.

Alasan peneliti memilih model Implementasi Kebijakan George Edward III dibandingkan dengan Model-Model Implementasi Kebijakan yang lain adalah dapat memberikan jawaban akan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik sesuai dengan permasalahan yang ada pada Kampung Adat Kambajawa.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kampung Adat Kambajawa Kabupaten Sumba Tengah.

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pariwisata Kampung Adat Kambajawa Kabupaten Sumba Tengah

Kampung Adat Kambajawa adalah salah satu destinasi wisata budaya di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Kampung Adat Kambajawa memiliki keindahan alam dan budaya yang terjaga dengan baik yang menjadikan kampung ini menjadi salah satu destinasi wisata yang harus dikunjungi. Ciri khas dari Kampung Adat Kambajawa ini terletak pada rumah adat yang berbentuk seperti menara. Menara rumah adat yang tingginya bisa mencapai 30 meter dengan filosofi tersendiri yang melekat dengan kepercayaan masyarakat. Berikut dokumentasi Rumah Adat pada Kampung Adat Kambajawa yaitu:

Keindahan alam pada Kampung Adat Kambajawa yang memukau dan kelestarian budaya yang dijaga dengan baik menjadikan kampung ini tempat yang harus dikunjungi. Pada Kampung Adat Kambajawa, terdapat nuansa mistis yang kuat, yang terkait dengan praktik Marapu (penyembahan leluhur). Tempat-tempat keramat, seperti batu kubur dan lokasi ritual Marapu, dijaga dengan tegas dan tidak boleh dijamah oleh siapapun. Berikut dokumentasi Ritual Marapu pada Kampung Adat Kambajawa yaitu:



Gambar 2 Ritual Marapu

Sumber: Rivaldo (2024)

Usaha dan Hasil Pengembangan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa Kabupaten Sumba Tengah

Dalam mengembangkan Pariwisata di Kampung Adat Kambajawa, masyarakat desa melakukan pembuatan kerajinan lokal yaitu Tas Anyaman Rotan yang dapat dibeli oleh Pengunjung yang datang. Selain itu, Pengunjung juga dapat belajar cara pembuatan Tas Anyaman Rotan serta mencicipi kuliner khas Sumba Tengah seperti Kapurung, Manggulu dan Kaparak Sumba. Berikut dokumentasi pembuatan kerajinan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Adat Kambajawa yaitu:



Gambar 3 Pembuatan Tas Anyaman Rotan

Sumber: bumikami.id

Selain itu, untuk mengembangkan Pariwisata di Kampung Adat Kambajawa, pihak pengelola wisata juga mengadakan beberapa festival seni seperti Tarian Reja. Tarian Reja adalah tarian kegembiraan, yang di pertunjukkan pada saat membangun

rumah atau membawa hasil panen kepada Marapu, dan lain-lain. Bentuk penyajiannya adalah pria dan wanita bergandeng tangan menari sambil bernyanyi diiringi irama gong dan tambur (Kubayowi, 2023). Berikut dokumentasi Tarian Reja pada Kampung Adat Kambajawa yaitu:



Gambar 4 Tarian Reja

Sumber: budaya-indonesia.org

Implementasi Pengembangan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan Teori George Edward III

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sesuai Teori George Edward III dalam menganalisis implementasi kebijakan terdapat 4 parameter penilaian yang digunakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan teori Edward III tersebut dapat dianalogikan kebijakan akan terwujud dengan baik jika kebijakan itu dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan; tersedia sumber daya yang cukup baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial, disposisi atau sikap pelaksana yang baik seperti komitmen, konsistensi, kejujuran, dan kedisiplinan; serta adanya organisasi pelaksana, ada pembagian kerja, dan ada petunjuk mekanisme atau prosedur pelaksanaan yang ditetapkan secara jelas dan dipahami pelaksana kebijakan.

1. Komunikasi

Dari hasil wawancara akan faktor Implementasi Kebijakan “Komunikasi” pada indikator “Pengambil Kebijakan” dapat diketahui bahwa Pengambil kebijakan pariwisata pada Kampung Adat

Kambajawa adalah Pihak Dinas Pariwisata Sumba Tengah. Namun dalam penentuan kebijakan pariwisata, Pihak Dinas Pariwisata Sumba Tengah melibatkan Kepala Desa dan Pengelola Wisata untuk melakukan diskusi akan kebijakan. Pengambil Kebijakan memiliki peran utama dan penting dalam pengembangan masyarakat, terutama dalam menjembatani pemecahan masalah dan memandu implementasi strategi (Hubeis dan Najib, 2019). Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota yang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota dan mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya.

Berdasarkan indikator “Komunikasi Kebijakan” diketahui hasil wawancara menunjukkan Komunikasi kebijakan dilakukan dengan melalui Rapat, Sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai kebijakan pariwisata yang akan diterapkan. Selain itu, Pihak Dinas Pariwisata Sumba Tengah juga menyediakan Grup Whatsapp sebagai sarana koordinasi kebijakan tiap objek wisata. Menurut Yuwafik (2020), Grup WhatsApp mempermudah dalam hal membagikan informasi terkait kejadian terbaru dan diskusi mengenai agenda yang akan dan telah dilakukan, dan berbagai pengumuman lainnya.

Pada indikator “Komunikasi Pengelolaan Wisata”, hasil wawancara menunjukkan Komunikasi Pengelolaan Wisata di Desa Kampung Adat Kambajawa dilakukan dengan media *Whatsapp Group* antara Pihak Dinas Pariwisata Sumba Tengah, Pengelola Wisata dan Kepala Desa Kampung Adat Kambajawa. Selain itu, setiap minggu pihak Dinas Pariwisata melakukan *controlling* akan kondisi yang ada pada objek pariwisata Kampung Adat Kambajawa. *Controlling* atau pengendalian sangat penting dalam

manajemen karena membantu organisasi mencapai tujuannya secara efisien dan efektif (Maharani, 2020).

Indikator “Efektivitas Komunikasi” menunjukkan pengelolaan pariwisata di Kampung Adat Kambajawa terlaksana secara baik dengan bantuan media *Whatsapp Group* dan proses *controlling* tiap minggu. Pengawasan (*Controlling*) memiliki fungsi yang sangat penting, karena tanpa adanya pengawasan maka fungsi-fungsi yang lainnya tidak akan berjalan efektif dan efisien. Pengawasan tidak hanya berlangsung pada saat pelaksanaan, tetapi juga pada saat perencanaan dan pengorganisasian. Pada dasarnya dalam fungsi pengawasan juga terdapat proses pengevaluasian untuk menjaga agar seluruh kegiatan tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai (Prastuti, 2022).

Kemudian pada indikator “Hambatan proses komunikasi”, hasil wawancara menyatakan hambatan komunikasi Pengelolaan Wisata Kampung Adat Kambajawa adalah faktor sinyal dan Sumber Daya Manusia. Untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Manusia, pihak Pengelolaan Wisata Kampung Adat Kambajawa bersama Dinas Pariwisata Sumba Tengah dapat mengadakan pelatihan sesuai pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata dalam lingkup kabupaten/kota serta menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata. Sedangkan untuk mengatasi hambatan sinyal dapat dilakukan penggunaan radio amatir adalah alat komunikasi dua arah yang digunakan untuk berlatih dan bertukar informasi tanpa maksud komersial (Aziz, 2022).

Secara garis besar, pelaksanaan komunikasi pada Kebijakan dalam Pengembangan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa Kabupaten Sumba Tengah telah berjalan dengan jelas walaupun terdapat hambatan dari faktor Sinyal dan

Sumber Daya Manusia dalam penggunaan Handphone sebagai sarana komunikais dengan pihak Dinas Pariwisata Sumba Tengah.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara terkait Indikator “Jenis Sumber Daya” menunjukkan sumber Daya yang dimiliki oleh Kampung Adat Kambajawa adalah Sumber Daya Manusia dari masyarakat Kampung Adat Kambajawa serta Sumber Daya Finansial dari uang yang diberikan pihak Dinas Pariwisata Sumba Tengah. Sumber daya manusia (SDM) sangat penting karena merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pengelolaan pariwisata (Muktamar et al., 2024). Sedangkan Sumber Daya Pendanaan juga dibutuhkan dalam pembiayaan usaha pengembangan pariwisata di Kampung Adat Kambajawa

Terkait Indikator “Ketersediaan Sumber Daya” dapat diketahui bahwa Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Kampung Adat Kambajawa sudah cukup dengan antusiasme masyarakat dalam ikut serta pada pengelolaan wisata. Namun ketersediaan Sumber Daya Pendanaan pada Kampung Adat Kambajawa masih minim. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam penerapan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengalokasikan anggaran Kepariwisataan.

Hasil wawancara mengenai indikator “Efektivitas Penggunaan Sumber Daya” diketahui Efektivitas penggunaan Sumber Daya dalam pengelolaan pariwisata di Kampung Adat Kambajawa sudah cukup baik untuk Sumber Daya Manusia walaupun terhadap kekurangan dalam penyediaan informasi wisata kepada Pengunjung. Sedangkan untuk efektivitas Sumber Daya Finansial masih kurang terlaksana dimana terbukti masih banyak Infrastruktur yang belum terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya fasilitas Jalan yang masih minim pada Kampung Adat Kambajawa. Berikut

dokumentasi Jalan di Kampung Adat Kambajawa, yaitu:

Hasil wawancara mengenai Proses Penilaian dan Evaluasi Penggunaan Sumber Daya menunjukkan proses penilaian dan evaluasi penggunaan sumber daya dilakukan dengan evaluasi tiap bulan oleh pihak Dinas Pariwisata. Evaluasi yang dilakukan mengenai jumlah pengunjung, kondisi pengelolaan wisata serta kinerja pengelola wisata di Kampung Adat Kambajawa. Hal ini merupakan implementasi Pemerintah Kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan di wilayahnya. Menurut Bagir (2020), penilaian dan evaluasi pariwisata penting karena dapat membantu dalam mengukur tingkat pengembangan pariwisata di suatu daerah, memahami kelebihan dan kekurangan pariwisata, merumuskan strategi pengembangan pariwisata yang sesuai dan mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan.

Secara garis besar, parameter Sumber Daya pada Pengelolaan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa telah didukung dengan Sumber Daya Manusia yang cukup. Walaupun untuk Sumber Daya Finansial masih kurang terlaksana dimana terbukti masih banyak Infrastruktur yang belum terpenuhi.

3. Disposisi

Dari hasil wawancara mengenai indikator “Sikap Pembuat Kebijakan dalam Pengelolaan Wisata menunjukkan Sikap Pembuat Kebijakan terhadap pengembangan pariwisata di Kampung Adat Kambajawa masih kurang. Terbukti kurang pedulinya Pembuat Kebijakan khususnya Dinas Pariwisata untuk lebih peduli dalam pengembangan pariwisata berskala nasional dan internasional serta kurang tegas untuk mencegah pungli. Maka diketahui bahwa Pembuat Kebijakan masih belum mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk

Pariwisata yang berada di wilayahnya dan memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru. Menurut Simatupang (2020), menyatakan apabila pembuat kebijakan tidak memahami proses pembuatan kebijakan, maka kebijakan publik yang dihasilkan mungkin tidak berhasil.

Kemudian hasil wawancara terkait faktor “Sikap Pembuat Kebijakan mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Pariwisata” menyatakan Sikap pembuat kebijakan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pariwisata di Kampung Adat Kambajawa masih kurang. Hal ini terbukti dari masih sedikitnya perhatian Dinas Pariwisata Sumba Tengah dalam penyediaan infrastruktur, investasi dan promosi global terhadap wisata Kampung Adat Kambajawa. Maka diketahui implementasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya dan memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru masih belum optimal. Menurut Makal (2021), fasilitas pendukung atau sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam menunjang pengembangan objek wisata terkait.

Pada indikator “Sikap Pembuat Kebijakan dan Pelaksana berinteraksi dalam Pengelolaan Pariwisata” menunjukkan Sikap pembuat kebijakan dan pelaksana berinteraksi dalam pengelolaan pariwisata di Kampung Adat Kambajawa masih belum optimal dikarenakan kurangnya pelaksanaan *Focus Group Discussion* antar masyarakat, pengelola wisata dan pihak Dinas Pariwisata untuk membahas perkembangan dan permasalahan pada Kampung Adat Kambajawa hanya pada saat kunjungan. Maka disimpulkan sikap pembuat kebijakan dan pelaksana berinteraksi dalam pengelolaan pariwisata di Kampung Adat Kambajawa masih belum memenuhi kewenanga Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan

Kepariwisataan di wilayahnya. Hubungan antar-organisasi perlu memainkan peran penting dalam pengelolaan wisata (Bygballe, 2023).

Hasil wawancara mengenai indikator “Sikap dukungan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Kampung Adat Kambajawa” menunjukkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Kampung Adat Kambajawa sangat besar, terbukti dari partisipasi masyarakat dalam membantu memberikan arahan kepada pengunjung, menyambut pengunjung yang datang, menyediakan kuliner ataupun souvenir yang dapat dibeli oleh pengunjung serta penjagaan kebersihan di area pariwisata yang didukung dengan adanya pelatihan yang diadakan Dinas Pariwisata.

Maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan memenuhi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota serta menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata. Contoh dari Sikap dukungan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Kampung Adat Kambajawa adalah adanya swadaya dalam pembuatan fasilitas Kamar Mandi sederhana. Berikut dokumentasi fasilitas Kamar Mandi sederhana yang dibuat oleh masyarakat yaitu:



Gambar 5 Fasilitas Kamar Mandi Swadaya di Kampung Adat Kambajawa

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2024)

Secara garis besar, parameter Disposisi pada Pengelolaan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa telah didukung dengan dukungan masyarakat Kampung Adat Kambajawa dalam pengelolaan wisata. Namun untuk Sikap Pembuat Kebijakan yaitu Dinas Pariwisata Sumba Tengah masih kurang peduli untuk lebih pengembangan pariwisata berskala nasional dan internasional serta kurang tegas untuk mencegah pungli.

4. Struktur Birokrasi

Hasil wawancara mengenai indikator “Struktur Birokrasi Pengelolaan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa” menunjukkan struktur Birokrasi pengelolaan pariwisata di Kampung Adat Kambajawa terpusat pada Dinas Pariwisata Sumba Tengah. Kepala Desa dan Pengelola Wisata di Kampung Adat Kambajawa akan melakukan komunikasi dengan Dinas Pariwisata Sumba Tengah untuk melaporkan kondisi pariwisata ataupun membahas permasalahan. Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya.

Kemudian hasil wawancara terkait indikator “Struktur Birokrasi menghambat Pengelolaan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa” menunjukkan Pengelolaan pariwisata di Kampung Adat Kambajawa telah berjalan baik karena jelas arah komunikasinya dan terpusat pada Dinas Pariwisata Sumba Tengah. Walaupun terdapat hambatan dari responden Dinas Pariwisata Sumba Tengah yang kurang cepat dalam menanggapi komunikasi atau keluhan.

Secara garis besar, Parameter Struktur Birokrasi pada Pengelolaan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa telah terlaksana dengan baik dengan adanya Pihak Dinas Pariwisata Sumba Tengah sebagai pusat komando. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dari respon Dinas

Pariwisata Sumba Tengah yang membutuhkan waktu.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan didapatkan kesimpulan penelitian bahwa Implementasi Penetapan Peraturan Pemerintah Tentang Cipta Kerja dalam Pengembangan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa Kabupaten Sumba Tengah secara garis besar telah memenuhi parameter Implementasi Kebijakan sesuai Teori George Edward III. Pada faktor Komunikasi, pelaksanaan komunikasi Pengembangan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa Kabupaten Sumba Tengah telah berjalan dengan jelas walaupun terdapat hambatan dari faktor Sinyal dan Sumber Daya Manusia dalam penggunaan Handphone. Kemudian faktor Sumber Daya, pengelolaan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa telah didukung dengan Sumber Daya Manusia yang cukup walaupun untuk Sumber Daya Finansial masih kurang. Pada faktor Disposisi, Pengelolaan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa telah didukung dengan dukungan masyarakat Kampung Adat Kambajawa. Namun untuk Sikap Pembuat Kebijakan yaitu Dinas Pariwisata Sumba Tengah masih kurang peduli untuk mengembankan pariwisata berskala nasional dan internasional serta kurang tegas untuk mencegah pungli. Sedangkan faktor Struktur Birokrasi pada Pengelolaan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa telah terlaksana dengan baik dengan adanya Pihak Dinas Pariwisata Sumba Tengah sebagai pusat komando, walaupun terdapat permasalahan dari respon Dinas Pariwisata Sumba Tengah yang membutuhkan waktu.

Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pariwisata Kampung Adat Kambajawa di Kabupaten Sumba Tengah adalah Adanya Sumber Daya Manusia yang cukup dan Kejelasan Struktur Birokrasi. Sedangkan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pariwisata

Kampung Adat Kambajawa di Kabupaten Sumba Tengah adalah Minimnya Pendanaan Pengembangan Wisata, Kurangnya sikap peduli Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata dan Kendala Sinyal dalam komunikasi.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa saran terkait Pengembangan Pariwisata di Kampung Adat Kambajawa yaitu : (1) Untuk Dinas Pariwisata Sumba Tengah agar lebih memperhatikan Pengembangan Pariwisata di Kampung Adat Kambajawa dengan melakukan kerjasama dengan Stakeholder swasta dalam pembangunan infrastruktur wisata yang masih kurang pada Kampung Adat Kambajawa. (2) Untuk Dinas Pariwisata Sumba Tengah dan Pengelola Wisata di Kampung Adat Kambajawa untuk lebih meningkatkan promosi wisata secara lebih masif dan lingkup internasional. (3) Untuk Kepala Desa Kampung Adat Kambajawa agar dapat mengimplementasikan Radio Amatir sebagai alternatif komunikasi dengan Pihak Dinas Pariwisata Sumba Tengah secara lebih cepat dan aman dari sisi sinyal koneksi.

REFERENSI

- Alfitriadi. (2022). *Opini Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*. Universitas Islam Riau.
- Asmara, E., Amanu, H., & Lovia, E. (2022). Opini Publik Tentang Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan (Studi Deskriptif Opini Mahasiswa Universitas Sumatera Selatan). *Jurnal Al-Kalam*, 8(1).
- Ayuningtyas, R. H., & Amni, Z. (2018). Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Implementasi Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo. *Angewandte Chemie International*, 6(11), 951–962.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- McIntosh, P. (2019). *On Privilege, Fraudulence, and Teaching As Learning: Selected Essays 1981--2019*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781351133791>
- Mulyadi, D. (2019). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Nasution, L. N., Novalina, A., Rangkuty, D. M., Universitas, P., Panca, P., Pembangunan, U., & Budi, P. (2023). the Strength of the Seemingly Unrelated Regression Model in Detecting Economic Growth and Poverty Rate Based on. *Jurnal Ekonomi*, 12(02), 25–33.
- Rahayu, T. I., & Gufron, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 17(2), 144. <https://doi.org/10.56444/mia.v17i2.1784>
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (Vol. 1). Pustaka Ramadhan.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Yoeti, O. A. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradnya Paramita.